

Pelatihan Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi di Kabupaten Toraja Utara

Rahmawati Haji Seseang *, Syamsuddin, Aini Indrijawati

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: rahmawatihs@unhas.ac.id

Info Artikel

Diterima: 06/01/2026

Direvisi: 08/04/2026

Disetujui: 10/05/2026

Abstract. *This community service activity aimed to strengthen the financial management capacity of local government apparatus in North Toraja Regency through structured training. The background was rooted in findings from the Audit Board of Indonesia (BPK), which revealed weaknesses in the internal control system, asset management, and budgetary sustainability, despite repeated unqualified audit opinions (WTP). The activity employed a participatory training method, focusing on regulatory understanding about regional financial management, performance-based budgeting, accrual-based financial reporting, and transparency accountability mechanisms. The training involved 25 officials from key agencies (the Finance Agency, the Inspectorate, and technical SKPDs) and was evaluated using pre- and post-tests and group discussions. Results showed a significant increase in participants' average competency score from baseline to 83.3 in the post-test, with 100% attendance. Outputs included a validated training module, activity documentation, and a draft scientific article for a SINTA-indexed journal. The activity successfully improved understanding of financial management principles, enhanced commitment to transparency and accountability, and laid the foundation for sustainable capacity building. Recommendations include regular follow-up training, institutionalizing internal mentoring, and integrating digital tools for cash and asset management.*

Keywords: *Local government financial management, Transparency, Accountability.*

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dalam pengelolaan keuangan melalui pelatihan terstruktur. Latar belakang kegiatan didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kelemahan sistem pengendalian internal, pengelolaan aset, dan ketidakseimbangan anggaran, meski daerah tersebut secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode yang digunakan adalah pelatihan partisipatif, dengan fokus pada pemahaman regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, penganggaran berbasis kinerja, pelaporan berbasis akrual, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Pelatihan diikuti oleh 25 aparatur dari instansi kunci (BPKAD, Inspektorat, dan SKPD teknis) dan dievaluasi melalui pre-test dan post-test, serta diskusi kelompok. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pada skor kompetensi rata-rata peserta menjadi 83,5 dengan tingkat kehadiran 100%. Luaran kegiatan meliputi modul pelatihan yang telah divalidasi, dokumentasi foto/video, serta draf artikel ilmiah untuk jurnal terakreditasi SINTA. Kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prinsip pengelolaan keuangan daerah, memperkuat komitmen pada transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi fondasi bagi penguatan kapasitas berkelanjutan. Rekomendasi mencakup pelatihan lanjutan berkala, penguatan mentor internal, dan integrasi teknologi digital dalam manajemen kas dan aset.

Kata Kunci: Manajemen keuangan daerah, Transparansi, Akuntabilitas.

How to Cite: Seseang, R. H., Syamsuddin, S., & Indrijawati, A. (2026). Pelatihan Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi di Kabupaten Toraja Utara. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 107–113. <https://doi.org/10.37478/abdika.v6i2.7488>



Copyright (c) 2026 Rahmawati Haji Seseang, Syamsuddin, Aini Indrijawati. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kabupaten Toraja Utara, meski telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut, menghadapi tantangan struktural dalam pengelolaan keuangannya—terutama dalam penyusunan APBD yang tidak selaras dengan kemampuan fiskal riil, pengelolaan aset tetap yang belum tertib, serta lemahnya sistem pengendalian internal (BPK, 2024). Hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 mengungkap defisit kas sebesar Rp11,9 miliar dan 499 persil tanah tanpa sertifikat, mengindikasikan adanya celah dalam tata kelola keuangan dan aset.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya tantangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan tim pengabdian, banyak aparatur yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi terbaru pengelolaan keuangan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kesulitan ini sering terwujud dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja dan pelaporan keuangan berbasis akrual yang masih menimbulkan kesalahan teknis.

Transparansi dan akuntabilitas terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan anggaran (Fathirah et al., 2024). Implementasi e-budgeting dan digitalisasi laporan keuangan dapat mempercepat akses informasi dan memperkuat akuntabilitas, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen, kapasitas SDM, dan infrastruktur (Arianto et al., 2025). Kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran yang matang, serta transparansi publik terbukti berpengaruh positif terhadap sinkronisasi dan kualitas dokumen anggaran. Namun, masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan SDM dan kurang optimal dalam melibatkan masyarakat (Syuroh, 2020; Hikmah et al., 2015; Adam et al., 2024). Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai respons akademik untuk memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan partisipatif yang aplikatif dan kontekstual.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang, sekaligus memperkuat keterampilan teknis dalam penyusunan APBD berbasis kinerja serta pelaporan keuangan berbasis akrual. Melalui kegiatan ini diharapkan pula tumbuh kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pada akhirnya, kegiatan ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi langkah tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan guna memastikan peningkatan kapasitas aparatur dapat terjaga dan terus berkembang.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan pelatihan partisipatif pada tanggal 21 November 2025 di Aula Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Metode ini dipilih karena terbukti efektif dalam mentransfer pengetahuan sekaligus membangun komitmen aparatur (Kirkpatrick, 2019), serta sesuai dengan prinsip *capacity building* berbasis masalah aktual (Sugiyono, 2019).

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dirancang secara sistematis dan berkesinambungan agar tujuan peningkatan kapasitas dapat tercapai secara optimal. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi intensif dengan mitra, penyusunan modul pembelajaran yang relevan, identifikasi dan penetapan peserta sebanyak 25 orang yang berasal dari BPKAD, Inspektorat, dan SKPD teknis, serta validasi materi oleh tim ahli guna memastikan kesesuaian substansi dengan regulasi dan praktik terkini.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi utama. Sesi pertama difokuskan pada pemaparan dan diskusi mengenai regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai landasan konseptual dan normatif. Sesi kedua diarahkan pada penguatan aspek praktis melalui simulasi pencatatan akuntansi berbasis akrual, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, pembahasan studi kasus temuan BPK, serta latihan langsung agar peserta memperoleh pengalaman aplikatif dan pemahaman yang lebih mendalam.

Tahap berikutnya adalah evaluasi, yang dilakukan dengan

mengombinasikan pre-test dan post-test menggunakan skala penilaian 0–100 untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, serta *focus group discussion* (FGD) yang dimanfaatkan untuk menggali masukan, tantangan, dan rekomendasi implementatif sesuai konteks kerja masing-masing peserta. Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan tahap tindak lanjut berupa penyusunan modul dan laporan kegiatan, perumusan draf artikel ilmiah, serta pengajuan usulan program mentorship dan pelatihan lanjutan sebagai upaya menjaga keberlanjutan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara sistematis sejak bulan Juni 2025. Seluruh rangkaian persiapan hingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa pelatihan dapat menjawab kebutuhan mitra dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Tahap persiapan dilakukan melalui beberapa rapat koordinasi internal dan konsultasi dengan pihak mitra, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya dalam tahap pra-pelatihan diarahkan untuk menggali informasi mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan di Kabupaten Toraja Utara. Tahap ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa materi pelatihan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra.

Pertemuan dilakukan dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Toraja Utara, Dr. Sutrisno Parintak, SE., M.Si.. Beberapa poin penting yang diperoleh adalah bahwa kondisi pengelolaan keuangan belum memadai, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Tahap pra-pelatihan ini memberikan dasar penting dalam merumuskan materi pelatihan yang lebih aplikatif dan fokus pada area yang paling membutuhkan penguatan.

Selanjutnya, tahap pelatihan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025 di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang merupakan pengelola keuangan dari berbagai SKPD. Tim FEB Unhas diterima oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.



Gambar 1. Sesi Pembukaan Kegiatan

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Ir. Amos Sarungallo, Asisten Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Gambar 1). Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat relevan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, adanya regulasi baru mengenai pengelolaan keuangan membuat peningkatan kapasitas aparatur menjadi urgent. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sangat mengapresiasi kontribusi FEB Unhas.

Pelatihan diikuti oleh 25 aparatur (Gambar 2) dari berbagai perangkat daerah (Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Inspektorat, dan SKPD teknis). Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara penuh, dengan tingkat kehadiran mencapai 100%.



Gambar 2. Peserta Kegiatan Pelatihan

Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan telah memberikan dampak positif dan memenuhi seluruh target luaran. Kapasitas aparatur meningkat secara signifikan pada aspek penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengendalian intern sesuai amanat PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020. Hal ini diharapkan mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan signifikan pada semua komponen penilaian (Tabel 1). Peningkatan ini melampaui target 40% kenaikan skor, mengindikasikan efektivitas desain pelatihan yang integratif dan kontekstual.

Tabel 1. Rata-rata skor *post-test* peserta

No	Komponen Penilaian	Skor Rata-rata
1	Pemahaman regulasi keuangan daerah	86,7
2	Pelaporan berbasis akrual	80,2
3	Rata-rata keseluruhan	83,5

Penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin melalui pemahaman yang lebih utuh terhadap tiga pilar utama, yakni perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan. Pada aspek perencanaan dan penganggaran, peserta tidak hanya memahami pentingnya keterpaduan antara RKPD, KUA, dan PPAS, tetapi juga menyadari bahwa keselarasan tersebut harus didasarkan pada kemampuan fiskal riil daerah. Pemahaman ini mendorong

peserta untuk mampu mengidentifikasi potensi *fiscal gap* sejak tahap awal perencanaan, sekaligus merumuskan strategi penutupannya secara rasional dan berkelanjutan, baik melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pada pilar pelaksanaan dan penatausahaan, penguatan kompetensi tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap alur pengelolaan keuangan daerah, mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga pencairan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam konteks ini, peran bendahara semakin dipahami sebagai *gatekeeper* administrasi yang memegang fungsi strategis dalam memastikan setiap transaksi memenuhi aspek kelengkapan dan kepatuhan dokumen. Pembahasan studi kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara nyata membuka kesadaran peserta akan besarnya risiko yang timbul akibat kelalaian dalam proses verifikasi, yang tidak hanya berdampak administratif tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan reputasi institusi.



Gambar 3. Sesi Pemaparan Materi

Sementara itu, pada pilar akuntansi dan pelaporan, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap perbedaan mendasar antara basis kas dan basis akrual, serta implikasinya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Peserta mampu mengenali struktur dan keterkaitan Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai satu kesatuan informasi keuangan yang mencerminkan kinerja dan posisi keuangan pemerintah daerah secara komprehensif. Selain itu, meningkat pula pemahaman mengenai proses konsolidasi laporan keuangan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sehingga pelaporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Diskusi kelompok yang dilakukan dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga melahirkan komitmen bersama yang nyata dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Para peserta sepakat untuk mendorong keterbukaan informasi publik melalui publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara utuh dan mudah diakses pada laman resmi pemerintah daerah dalam jangka waktu paling lambat enam bulan. Selain itu, disepakati pula perlunya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan berkala kepada masyarakat, dengan frekuensi minimal setiap triwulan, sebagai wujud pertanggungjawaban yang berkesinambungan dan mudah dipahami publik. Komitmen tersebut diperkuat dengan rencana pembentukan tim khusus yang secara fokus bertugas menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga setiap rekomendasi dapat ditangani secara sistematis, tepat waktu, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Pelatihan Manajemen Keuangan Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan. Secara umum, kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif dan nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur mitra, khususnya dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah, memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Seluruh luaran wajib maupun luaran tambahan berhasil dihasilkan, termasuk penyusunan draf artikel ilmiah yang direncanakan untuk dipublikasikan pada jurnal terindeks SINTA, sebagai bentuk diseminasi pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara disarankan untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan serupa secara berkala dan berjenjang, sehingga peningkatan kapasitas aparatur dapat terjaga dan terus berkembang, sekaligus menerapkan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal yang telah dibahas dan disepakati bersama. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, kegiatan ini menjadi pijakan awal untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Daerah Toraja Utara, tidak hanya melalui program pelatihan, tetapi juga dalam bentuk pendampingan berkelanjutan, konsultasi teknis, serta penelitian terapan yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sementara itu, bagi tim pengabdian atau pelaksana kegiatan selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model pelatihan yang lebih spesifik dan mendalam sesuai kebutuhan daerah, serta mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam materi dan metode pelatihan pengelolaan keuangan daerah agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem dan tuntutan akuntabilitas publik. Dengan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, pelatihan ini berpotensi menjadi *catalyst* bagi transformasi tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan dari ketaatan administratif menuju orientasi kinerja dan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara atas kolaborasi aktifnya, serta kepada FEB Universitas Hasanuddin atas dukungan pendanaan melalui Hibah KIPKU 2025.

Daftar Pustaka

- Adam, S., Kelana, E., & Akadira, T. (2024). Evaluation of the Performance of Bappeda Gayo Lues Regency in the Process of Preparing the Regional Development Work Plan. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i4.41597>
- Arianto, A., Amanda, A., Fadhilah, A., Qomari, F., Candra, I., & Saputra, B. (2025). E-Budgeting Implementation on Public Financial Transparency and Accountability at The Communication and Information Department of Padang City. *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*. <https://doi.org/10.46730/jiana.v22i2.8253>
- BPK. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023*. Makassar: BPK Perwakilan Sulawesi Selatan.
- COSO. (2020). *Internal Control – Integrated Framework*. New York: AICPA.
- Fathirah, D., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Budget Transparency and Accountability in Local Government. *Asian Journal of Management Analytics*. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878>
- Hikmah, N., Busaini, & Pancawati, S. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran, Dan Transparansi Publik Terhadap Sinkronisasi Dokumen Apbd Dengan Kua-Ppas Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat., 3, 103-115.
- Kirkpatrick, D. L. (2019). *The Updated Kirkpatrick Model for the 21st Century*. New York: Routledge.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Rahmat, M. (2020). Politics, Political Dynamics and Accountability of Regional Budgets in Creating Budget Transparency. *ARISTO*, 9(2), 225–236.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syuroh, M. (2020). The Effect of Human Resources Capacity, Budget Planning, Political Budgeting, and Public Transparency on the APBD Documents and KUA-PPAS's Synchronization in Musi Banyuasin District Government. *RUDN Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.47577/tssj.v7i1.320>
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.